



PHRI Sorot Penginapan Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Keputusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberlakukan moratorium pembangunan hotel baru di kawasan sumbu filosofi disambut baik oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan moratorium hotel di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Bahkan, pihaknya sudah mengusulkan moratorium kepada Gubernur DIY tahun lalu.

"Kita mendukung hal itu dan sebetulnya moratorium di kota dan Sleman sudah kita sampaikan kepada gubernur tahun lalu," kata dia saat dihubungi, Jumat (23/5).

Deddy menambahkan pihaknya mengusulkan moratorium dengan alasan agar okupansi hotel di DIY tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik. "Agar ada pemerataan okupansi di

Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul," ujarnya.

Ia berharap kebijakan moratorium di kawasan sumbu filosofi juga dibarengi dengan kebijakan penertiban penginapan-penginapan ilegal. "Kita mohon ada penertiban pendataan homestay, kos-kosan, yang dijual harian untuk izin dan juga pajak-pajaknya," tutur Deddy.

Ia meyakini apabila moratorium tidak dibarengi dengan kebijakan penertiban penginapan, penginapan ilegal bakal menjamur di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pasti nantinya di Kota Jogja akan lebih menjamur *homestay*, kos-kosan harian, dan semacamnya," ucapnya.

Dia menambahkan, dengan diberlakukannya moratorium, juga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta.

"Selain itu, kepadatan lalu lintas akan berkurang, asal homestay, kos-kosan, semacamnya juga ada pemantauan izin dan pengetatan izin," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil langkah tegas dalam menjaga kelestarian kawasan inti sumbu filosofi. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, secara resmi menetapkan moratorium pembangunan hotel baru di wilayah tersebut.

Kebijakan tersebut berlaku khusus di *core zone* sumbu filosofi, yang membentang dari Jalan Margo Utomo, Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krapyak. "Saya sampaikan kepada teman-teman di manajemen, manajer-manajer hotel, ini supaya mereka jangan punya keinginan mulai sekarang ini untuk membangun di *core zone* ini," ujar Hasto, Rabu (21/5). (**kpc**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005